BAB III

OBYEK PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Provinsi Jawa Barat

3.1.1 Sejarah Singkat Berdirinya Provinsi Jawa Barat

Jawa Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia. Ibu kotanya berada di Kota Bandung. Perkembangan Sejarah menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat merupakan Provinsi yang pertama dibentuk di wilayah Indonesia (staatblad Nomor : 378). Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan UU No.11 Tahun 1950, tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat. Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Bagian barat laut provinsi Jawa Barat berbatasan langsung dengan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, ibu kota negara Indonesia. Pada tahun 2000, Provinsi Jawa Barat dimekarkan dengan berdirinya Provinsi Banten, yang berada di bagian barat. Sejak pembentukannya selama lebih kurang 50 tahun, wilayah Kabupaten atau Kota di Jawa Barat bertambah 5 wilayah, yakni Kabupaten Subang (1968), Kota Tangerang (1993), Kota Bekasi (1996), Kota Cilegon dan Kota Depok (1999). Padahal dalam kurun waktu tersebut telah banyak perubahan baik dalam bidang pemerintahan, ekonomi, maupun kemasyarakatan.

Secara kuantitatif jumlah Wilayah Pembantu Gubernur tetap 5 wilayah dengan tediri dari : 20 kabupaten dan 5 kotamadya, dan tahun 1999 jumlah kotamadya bertambah menjadi 8 kotamadya. Kota administratif berkurang dari enam daerah menjadi empat, karena Kota Depok pada tahun 1999 berubah status

menjadi kota otonom. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Provinsi Banten, maka Wilayah Administrasi Pembantu Gubernur Wilayah I Banten resmi ditetapkan menjadi Provinsi Banten dengan daerahnya meliputi: Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten atau Kota Tangerang serta Kota Cilegon. Adanya perubahan itu, maka saat ini Provinsi Jawa Barat terdiri dari: 16 Kabupaten dan 9 Kotamadya, dengan membawahkan 584 Kecamatan, 5.201 Desa dan 609 Kelurahan. Adapun monografinya:

Tabel 3.1. Data Penduduk Jawa Barat

Kabupaten/Kota	2005	2006	2007	2008
Kab				
01. Bogor	4 100 934	4 216 186	4 316 236	4 402 026
02. Sukabumi	2 224 993	2 240 901	2 258 253	2 277 020
03. Cianjur	2 098 644	2 125 023	2 149 121	2 169 984
04. Bandung	4 263 934	4 399 128	3 038 038	3 116 056
05. Garut	2 321 070	2 375 725	2 429 167	2 481 471
06. Tasikmalaya	1 693 479	1 743 324	1 792 092	1 839 682
07. Ciamis	1 542 661	1 565 121	1 586 076	1 605 891
08. Kuningan	1 096 848	1 118 776	1 140 777	1 163 159
09. Cirebon	2 107 918	2 134 656	2 162 644	2 192 492
10. Majalengka	1 191 490	1 197 994	1 204 379	1 210 811
11. Sumedang	1 067 361	1 089 889	1 112 336	1 134 288
12. Indramayu	1 760 286	1 778 396	1 795 372	1 811 764
13. Subang	1 421 973	1 441 191	1 459 077	1 476 418
14. Purwakarta	770 660	784 797	798 272	809 962
15. Karawang	1 985 574	2 031 128	2 073 356	2 112 433
16. Bekasi	1 953 380	1 991 230	2 032 008	2 076 146
17. Bandung Barat	-	-	1 493 225	1 531 072
Kota				
18. Bogor	844 778	855 846	866 034	876 292
19. Sukabumi	287 760	294 646	300 694	305 800

20. Bandung	2 315 895	2 340 624	2 364 312	2 390 120
21. Cirebon	281 089	285 363	290 450	298 995
22. Bekasi	1 994 850	2 040 258	2 084 831	2 128 384
23. Depok	1 373 860	1 393 568	1 412 772	1 430 829
24. Cimahi	493 698	506 250	518 985	532 114
25. Tasikmalaya	594 158	610 456	624 478	637 083
26. Banjar	173 576	177 118	180 744	184 577
Jawa Barat	**39 960 869**	**40 737 594**	**41 483 729**	42 194 869

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat 2008

3.1.2 Keadaan Geografis Provinsi Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat memiliki luas sebesar 3.584.644,92 hektar, dengan kondisi topografis beragam. Wilayah Provinsi Jawa Barat yang berada pada ketinggian 0-25 meter di atas permukaan laut (dpl) adalah seluas 330.946,92hektar, 312.037,34 hektar berada pada ketinggian 25-100 meter dpl, 650.086,65 hektar berada pada 100-500 meter dpl, 585.348,37 hektar berada pada ketinggian 500-1000 meter dpl dan 284.022,53 hektar berada pada ketinggian 1000 meter lebih dpl.

Secara administratif, pada tahun 2008 Provinsi Jawa Barat terdiri dari 26 kabupaten dan kota, yang terbagi dalam 17 kabupaten dan 9 kota, yaitu : Kabupaten Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Bandung Barat, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Cirebon, Majalengka, Sumedang, Indramayu, Subang, Purwakarta, Karawang, Bekasi, serta Kota Bogor, Sukabumi, Bandung, Cirebon, Bekasi, Depok, Cimahi, Tasikmalaya dan Banjar. Jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat, hingga akhir tahun 2007 mencapai 41.483.729 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk 1,83% dan tingkat kepadatan penduduk rata-rata

1.157 jiwa/tahun. Pada periode 2003-2007, laju Pertumbuhan penduduk Jawa Barat dapat dikendalikan secara signifikan, yaitu dari sebesar 2,25 persen pada tahun 2003 menjadi 1,83 persen pada tahun 2007. Pada tahun 2007, penduduk laki-laki sebanyak 20.919.807 jiwa dan perempuan sebanyak 20.563.922 jiwa. Sedangkan menurut kelompok umur, pada tahun 2003 hingga 2007 masih membentuk piramida dengan kelompok usia anak dan usia produktif yang besar. Sedangkan untuk tahun 2008 Jwa Barat memiliki jumlah penduduk sebanyak 42.194.869 jiwa. Selanjutnya, berdasarkan struktur lapangan pekerjaan, penduduk Jawa Barat didominasi penduduk bekerja di sektor pertanian, perdagangan, jasa dan industri.

Gambar 3.1
Peta Provinsi Jawa Barat



Sumber: Kompas.com

Provinsi Jawa Barat secara geografis berada diantara 5Â°50Â’ Â– 7Â°50Â’ Lintang Selatan dan 105Â° Â– 109Â° Bujur Timur. Provinsi ini merupakan wilayah yang terletak paling barat dari Pulau Jawa. Secara administratif, di

sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa dan DKI Jakarta, sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Banten, sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dan sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia. Sebelum terbentuknya Provinsi Banten, luas wilayah Jawa Barat 44.354,61 km2 atau 4.435.461 hektar; wilayah ini terdiri atas daratan utama (bagian barat Pulau Jawa) dan sejumlah pulau kecil yang terletak di Samudera Hindia (sebanyak 48 pulau), di Laut Jawa (4 pulau).

3.2 Gambaran Umum Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional

3.2.1 Sejarah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional

Pada tahun 1957 dibentuk Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) yang bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia. PBKI merupakan pelopor usaha kegiatan keluarga berencana Indonesia. Perkumpulan tersebut telah membantu meletakan landasan perubahan masyarakat maupun pemerintah, sehingga kegiatan usaha keluarga berencana menjadi program nasional. Perhatian tersebut diwujudkan dalam bentuk Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN) yang berstatus semi pemerintah, dimana pemerintah belum mengambil tanggung jawab sepenuhnya.

Lembaga Keluarga Berencana tersebut terbentuk pada tahun 1968 setelah lebih dari setahun melaksanakan kegiatan tersebut. Pemerintah menyadari bahwa usaha Keluarga Berencana merupakan bagian yang penting dalam Pembangunan Nasional ini akan baik apabila tanggung jawab dan pembiayaan secara penuh di tangan pemerintah. Dengan SK Presiden No.8 Tahun 1970, pada tanggal 29 Juni

1970 LKBN dirubah menjadi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan dasar pemikiran yaitu :

Program KB nasional perlu ditingkatkan dengan jalan lebih memanfaatkan fasilitas dan sumber daya yang tersedia. Program KB nasional perlu lebih digiat kan dengan mengikut-sertakan pemerintah dan pemerintahan nasional. Program KB nasional perlu diselenggarakan secara teratur dan terencana kearah terwujudnya tujuan dan arah sasaran yang telah ditetapkan. BKKBN bertugas untuk mengkoordinir semua kegiatan yang ada kaitanya dengan kegiatan perencanaan keluarga, dengan dibentuknya BKKBN maka peran dari PKBI dialihkan dalam bidang pendidikan masyarakat dan bidang latihan kerja masyarakat KB, dengan terbentuknya BKKBN diharapkan akan berhasil mengendalikan serta menurunkan tingkat kelahiran.

Usaha pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya dibidang kesejahteraan ekonomi tidak akan tercapai hasil yang memuaskan apabila tidak diikuti dan disertai pelaksanaan dan pengendalian kelahiran. Apabila program KB akan berhasil dengan baik maka pada tahun 1981 terlihat mulai menurun tingkat kelahirannya, dengan asumsi bahwa tingkat kesuburan secara berangsur-angsur dan secara garis lurus, maka pada abad ke-20 ini jumlah penduduk di Indonesia berkisar 210 juta orang.

3.2.2 Visi dan Misi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Barat

Mengacu pada dasar pemikiran dan asumsi serta isue strategis dimuka, maka visi penyelenggaraan Program KB di Jawa Barat kedepan adalah:

"Mewujudkan Keluarga Berkualitas untuk Membangun Jawa Barat Sebagai Provinsi Termaju dan Mitra Terdepan Ibu Kota Negara Pada Tahun 2010 "

Visi tersebut mengandung nilai-nilai kehidupan keluarga dan masyarakat Jawa Barat yaitu: *Silih Asah, Silih Asih, Silih Asuh pikeun Ngawujudkeun Masyarakat anu Cageur, Bageur, Bener, Pinter tur Singer*; sedangkan nilai-nilai keluarga berku-alitas secara nasional yaitu: *Sejahtera, Sehat, Maju, Mandiri, Jumlah Anak Ideal, Berwawasan Kedepan, Bertanggung jawab, Harmonis, Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.*

Berdasarkan visi di atas maka misi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional sebagai berikut:

1. Memperkuat peran keluarga dalam upaya pengaturan kelahiran, ekonomi keluarga, dan pendidikan keluarga.
2. Penatalaksanaan Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga
3. Memantapkan pola penggerakan keluarga melalui pende-katan kultur.
4. Menumbuhkembangkan kemandirian keluarga dalam mengakses sumber-sumber pembangunan dibidang kesehatan reproduksi, pendidikan keluarga, dan ekonomi keluarga.
5. Perlindungan dan pemenuhan hak-hak keluarga serta penanggulangan masalah kesehatan reproduksi.

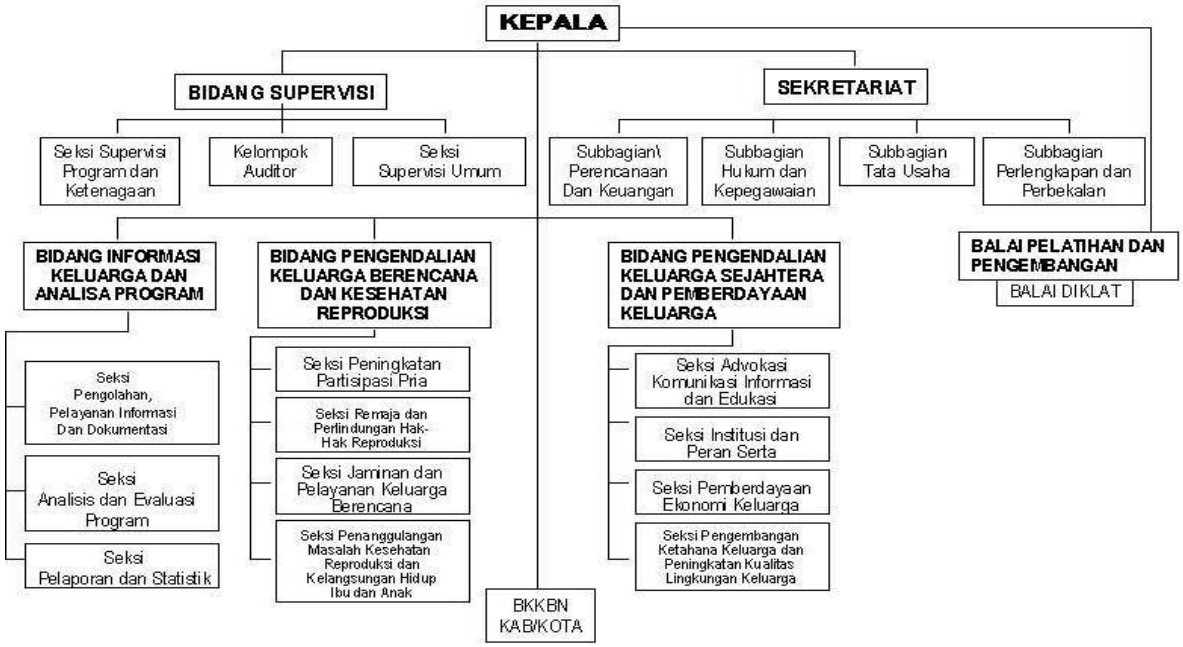
6. Memantapkan kualitas SDM pengelola program untuk terselenggaranya Pelayanan Prima yang memuaskan keluarga.
7. Mengembangkan kemitraan dengan prinsip saling membutuhkan, memperkuat, dan menguntungkan.

3.2.3 Struktur Organisasi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Barat

Struktur organisasi merupakan hubungan antara pegawai dan mengambarkan pembagian pekerjaan dan tanggung jawab suatu kelompok kerja, struktur organisasi akan selalu tertanggung pada luasnya bidang pekerjaan, dalam struktur organisasi akan terlihat jelas karena digambarkan dalam bagan organisasi yang membuat kedudukan dan status fungsional.

Struktur organisasi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional BKKBN kantor wilayah Jawa Barat tergambar dan dapat dilihat pada bagian lampiran.

Gambar 3.2
Bagan Stuktur Organisasi BKKBN Provinsi Jawa Barat



Sumber BKKBN Jawa Barat, 2010

Menurut Keputusan Mentri Negara Pemberdayaan perempuan / Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional No.70/HK-010/B5/2001 tentang organisasi dan tata kerja BKKBN di Provinsi Jabar dengan susunan sebagai berikut :

1. Kepala

   Mempunyai tugas :

   a. Memimpin BKKBN Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
   b. Menyiapkan kebijakan operasional sesuai dengan tugas BKKBN Provinsi.
   c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BKKBN Provinsi yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.

d. membina dan melakukan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain di Provinsi.

2. Sekertariat

Bertugas melaksanakan pelayanan administrasi dan pengelolaan sumber daya lingkungan BKKBN Provinsi.

Sekretariat terdiri dari :

a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Bertugas melakukan koordinasi perencanaan, penyusunan anggaran rutin, pembangunan dan bantuan luar negeri serta pengelolaan, pengendalian keuangan, analisis, realisasi dan pembukuan, administrasi perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.

b. Subbagian Hukum dan Kepegawaian

Bertugas melakukan pengelolaan dan pembinaan pegawai dan tenaga program serta penelaahan hukum, perundang – undangan, organisasi dan ketatalaksanaan.

c. Subbagian Tata Usaha

Bertugas melakukan pelayanan dan pengelolan urusan ketatausahaan, tata persuratan dan tata kearsipan, urusan dalam, pemeliharaan perkantoran, dan keprotokolan.

d. Subbagian Perlengkapan dan Perbekalan

Bertugas melakukan pengelolaan perlengkapan dan perbekalan atas pengendalian pelaksanaan rencana kebutuhan perlengkapan dan perbekalan.

3. Bidang Informasi Keluarga dan Analisis Program

Bertugas melaksanakan pengelolaan informasi keluarga dan analisis program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera di Provinsi.

Terdiri dari :

a. Seksi Pengolahan, Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas melakukan pengolahan data, pengelolaan teknologi informasi, pelayanan informasi dan telematika serta dokumentasi informasi program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera di Provinsi.
b. Seksi Analisis dan Evaluasi Program Bertugas melaukan analisis dan evaluasi pelaksanaan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera di Provinsi.
c. Seksi Pelaporan dan Statistik

   Bertugas melakukan penyusunan laporan dan pengelolaan statistik program keluarga berencana nasional dan pembangunan sejahtera di Provinsi.

4. Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.

   Bertugas melaksanakan penyiapan kebijakan operasional dan pengendalian program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Provinsi.

   Terdiri dari :

   a. Seksi Peningkatan Partisipasi Pria

      Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan pertisipasi pria di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

   b. Seksi Remaja dan Perlindungan Hak – hak Reproduksi

Bertugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan operasioanal serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengendalian program pembinaan remaja dan perlindungan hak – hak reproduksi di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

c. Seksi Jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana

   Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengendalian program jaminan dan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

d. Seksi Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi dan Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak.

   Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengendalian program penanggulangan masalah kesehatan reproduksi dan program peningkatan kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak.

5. Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga. Bertugas melaksanakan penyiapan kebijakan operasional dan pengendalian program keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga di Provinsi.

   Terdiri dari :

   a. Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi.

      Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengendalian program advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

b. Seksi Institusi dan Peranserta.

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengendalian program institusi dan peranserta di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

c. Seksi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengendalian program pemberdayaan ekonomi keluarga.

d. Seksi Pengembangan Ketahanan Keluarga dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga.

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengendalian program pengembangan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga di bidang keluarga.

6. Bidang Supervisi

Bertugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera di lingkungan BKKBN Provinsi Terdiri dari :

a. Sub Bagian Supervisi Program dan ketenagaan

Bertugas melakukan pemeriksaan, evaluasi, serta pengusutan kebenaran laporan pengaduan atas penyimpangan dan penyalahgunaan pelaksanaan program dan ketenagaan dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana Nasional dan Pembangunan Keluarga Sejahtera BKKBN di Provinsi.

b. Sub Bagian Supervisi Umum

Bertugas melakukan pemeriksaan, evaluasi, serta pengusutan kebenaran laporan pengaduan atas penyimpangan dan penyalahgunaan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan pembekalan serta administrasi BKKBN dalam program Keluarga Berencana Nasional dan Pembangunan Keluarga Sejahtera BKKBN di Provinsi.

3.2.4 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Barat

Tugas pokok dan fungsi BKKBN Provinsi Jabar mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang Keluarga Berencana, daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, BPMPKB mempunyai fungsi:

1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
2. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BKKBN.
3. Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah, swasta, LSOM dan masyarakat dibidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
4. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

3.3 Konsep Dasar Keluarga Berencana (KB) Di Provinsi Jawa Barat

Pelaksanaan Program KB di Jawa Barat tahun 2010 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahap II Program KB Jawa Barat tahun 2010-2014, diharapkan pelaksanaan program KB di Jawa Barat dapat berjalan lebih optimal untuk dalam mendukung Program Pembangunan pencapaian IPM Jawa Barat serta sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, namun demikian dari hasil yang dicapai belum sesuai dengan sasaran yang diharapkan. Berdasarkan pemaparan diatas hal ini disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun external dalam pengelolaan Program KB sampai tingkat lini lapangan.

Gerakan Keluarga Berencana (KB) Nasional adalah gerakan masyarakat yang menghimpun dan mengajak segenap potensi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam melembagakan dan membudayakan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS) dalam rangka meningkatkan mutu sumber daya manusia. Tujuan gerakan KB Nasional adalah mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera yang menjadi dasar bagi terwujudnya masyarakat yang sejahtera melalui pengendalian kelahiran dan pertumbuhan penduduk Indonesia. Aseptor KB (peserta keluarga berencana/*family planning participant*) ialah PUS yang mana salah seorang menggunakan salah satu cara/ alat kontrasepsi untuk pencegahan kehamilan, baik melalui program maupun non program.

Tujuan umum dari program KB adalah menurunkan angka kelahiran dan meningkatkan kesehatan ibu sehingga di dalam keluarganya akan berkembang Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS). Sasaran dalam program ini

adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang ditetapkan berdasarkan survei PUS yang dilaksanakan sekali dalam satu tahun dan pelaksanaannya di koordinasikan oleh Petugas Lapangan KB (PLKB).

Ruang lingkup dalam program KB terdiri dari:

1. Mengadakan penyuluhan KB, baik di Puskesmas maupun di masyarakat (pada saat kunjungan rumah, posyandu, pertemuan dengan kelompok Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, dasawisma dan sebagainya). Termasu ke dalamnya kegiatan penyuluhan ini adalah konseling untuk PUS.
2. Menyediakan dan pemasangan alat-alat kontrasepsi, memberikan pelayanan pengobatan efek samping KB.
3. Mengadakan kursus keluarga berencana untuk para dukun bersalin. Dukun diharapkan dapat bekerjasama dengan Puskesmas dan bersedia menjadi motivator KB untuk ibu-ibu yang mencari pertolongan pelayanan dukun.

Manfaat yang didapatkan apabila mengukuti program keluarga berencana antara lain :

1. Menekan angka kematian akibat berbagai masalah yang melingkupi kehamilan, persalinan dan aborsi yang tidak aman.
2. Mencegah Kehamilan terlalu dini (tubuhnya belum sepenuhnya tumbuh; belum cukup matang dan siap untuk dilewati oleh bayi. Lagipula, bayinya pun dihadang oleh risiko kematian sebelum usianya mencapai 1 tahun)

3. Mencegah kehamilan terjadi di usia tua. Perempuan yang usianya sudah terlalu tua untuk mengandung dan melahirkan terancam banyak bahaya. Khususnya bila ia mempunyai problema-problema kesehatan lain, atau sudah terlalu sering hamil dan melahirkan.
4. Menjarangkan KehamilanKehamilan dan persalinan menuntut banyak energi dan kekuatan tubuh perempuan. Kalau ia belum pulih dari satu persalinan tapi sudah hamil lagi, tubuhnya tak sempat memulihkan kebugaran, dan berbagai masalah bahkan juga bahaya kematian, menghadang.
5. Terlalu sering hamil dan melahirkan Perempuan yang sudah punya lebih dari 4 anak dihadang bahaya kematian akibat pendarahan hebat dan macam-macam kelainan lain, bila ia terus saja hamil dan bersalin lagi.

3.4 Konsep Dasar Kontrasepsi

Kontrasepsi adalah upaya untuk mencegah terjadinya kehamilan, upaya itu dapat bersifat sementara dan permanen. Kontrasepsi ideal harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Dapat dipercaya
2. Tidak menimbulkan efek yang menganggu kesehatan
3. Daya kerjanya dapat diatur menurut kebutuhan
4. Tidak menimbulkan gangguan sewaktu melakukan koitus.
5. Tidak memerlukan motivasi terus menerus

6. Mudah pelaksanaannya
7. Murah harganya sehingga dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat
8. Dapat diterima penggunaannya oleh pasangan bersangkutan

Alat kontrasepsi terbagi menjadi tiga jenis yaitu: Metoda Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR**),** Kontrasepsi Mantap.

1. Metoda Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Metoda Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)merupakan kontrasepsi yang dapat bertahan antara 3 tahun sampai seumur hidup. Seperti IUD, Implant/susuk KB, Steril pada pria/wanita.

2. Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)

Ada beberapa jenis alat KB yang bekerja dari dalam rahim untuk mencegah pembuahan sel telur oleh *sperma.* Biasanya alat ini disebut spiral, atau dalam bahasa Inggrisnya *Intra-Uterine Devices*, disingkat IUD. Spiral bisa bertahan dalam rahim dan terus menghambat pembuahan sampai 10 tahun lamanya. setelah itu harus dikeluarkan dan diganti. Bahan spiral yang paling umum digunakan adalah plastik, atau plastik bercampur tembaga.

Spiral tidak melindungi dari berbagai penyakit yang menular melalui hubungan seksual, termasuk HIV/AIDS. Selain itu spiral akan memperparah penyakit, menyebabkan komplikasi-komplikasi serius, umpamanya radang mulut rahim yang bisa membuat pasien kehilangan kesuburan (mandul). Cara kerjanya adalah sebagai berikut :

1. Menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke tuba falopii
2. Mempengaruhi fertilisasi sebelum ovum mencapai kavum uteri
3. AKDR bekerja terutama mencegah sperma dan ovum bertemu
4. Memungkinkan untuk mencegah implantasi telur dalam uterus

Keuntungan penggunaannya adalah sebagai berikut :

1. Memilki efektivitas tinggi (6 kegagalan dalam 1000 kehamilan)
2. AKDR dapat efektif segera setelah pemasangan
3. Metode jangka panjang (10 tahun proteksi dari CuT-380A dan tidak perlu diganti)
4. Sangat efektif karena tidak perlu lagi mengingat-ingat
5. Tidak mempengaruhi hubungan seksual
6. Meningkatkan kenyamanan seksual karena tidak perlu takut untuk hamil
7. Tidak ada efek samping hormonal dengan Cu AKDR (CuT-380A)
8. Tidak mempengaruhi kualitas dan volume ASI
9. Dapat dipasang segera setelah melahirkan atau sesudah abortus (apabila tidak terjadi infeksi)
10. Dapat digunakan sampai menopause (1 tahun atau lebih setelah haid terakhir)
11. Tidak ada interaksi dengan obat-obat
12. Membantu mencegah kehamilan ektopik

Kerugian penggunaannya adalah : Efek samping yang umum terjadi adalah sebagai berikut :

1. Perubahan siklus haid (umumnya pada 3 bulan pertama dan berkurang setelah tiga bulan)
2. Haid lebih lama dan banyak
3. Perdarahan antar menstruasi
4. Saat haid lebih sakit
5. Komplikasi lain :
6. Merasakan sakit dan kejang selama 3 sampai 5 hari setelah pemasangan
7. Perdarahan berat pada waktu haid
8. Perforasi dinding uterus
9. Tidak mencegah IMS termasuk HIV/AIDS
10. Tidak baik digunakan pada perempuan dengan IMS atau perempuan yang sering berganti pasangan
11. Penyakit radang panggul terjadi sesudah perempuan dengan IMS memakai AKDR

3. Kontrasepsi mantap

Kontrasepsi mantap adalah satu metode kontrasepsi yang dilakukan dengan cara mengikat atau memotong saluran telur (pada perempuan) atau saluran sperma (pada lelaki). Kontap adalah salah satu cara kontrasepsi untuk mengakhiri kelahiran. Kontrasepsi mantap (Kontap) dikenal ada dua macam, yaitu Kontap Pria dan Kontap Wanita.

3.5 Gambaran Umum Sub Sistem Informasi Manajemen Program Keluarga Berencana (SSIM-PKBN) Bagian dari website ***www.bkkbn.go.id*** di BKKBN Provinsi Jawa Barat

3.5.1 Bentuk Umum Sub Sistem Informasi Manajemen Program Keluarga Berencana SSIM-PKBN Bagian dari website ***www.bkkbn.go.id*** di BKKBN Provinsi Jawa Barat

Website *www.bkkbn.go.id* merupakan sebuah situs resmi yang dimiliki oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang menyediakan informasi tentang program KB yang ada di Jawa Barat didalam *Website* *www.bkkbn.go.id* tersebut terdapat sebuah Sub sistem Informasi Keluarga Berencana Nasional (SSIM-PKBN) Berdasarkan Keputusan Presiden No. 103 tahun 2000, tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, struktur organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen (LPND). Pada pasal 43 Kepres 103/2001 tersebut ditetapkan bahwa BKKBN mempunyai peran sebagai pelaksana tugas-tugas pemerintahan dibidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya tentang kedudukan dan fungsi BKKBN Provinsi dan Kab/Kota diatur dalam Kepres No.9 tahun 2004 pasal 114 ayat (2) bahwa sebagian tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh BKKBN di Kabupaten/Kota diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Selanjutnya pada ayat (3) dinyatakan bahwa sebagian tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh BKKBN Provinsi, tetap dilaksanakan oleh Pemerintah sampai ada ketentuan lebih lanjut. Sebagai implikasi dari penyerahan kewenangan tersebut untuk menjaga kesinambungan dan

kelangsungan pengelolaan data dan informasi, maka kewenangan pengelolaan data dan informasi Program KB Nasional masih tetap dipegang oleh Pusat sebagai salah satu SSIM-PKBN.

SSIM-PKBN yang bergerak dalam upaya penyediaan data dan informasi Program KB Nasional yang diperoleh dari hasil kegiatan pelaksanaan Program KB yang memuat tentang berbagai jenis data dan informasi yang dapat dijadikan sebagai sumber pengambilan keputusan. Sejalan dengan itu disusunlah SSIM-PKBN yang mencakup pokok-pokok kegiatan perencanaan kebutuhan, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyebarluasan data dan informasi serta dokumentasi, yang berarti penyediaan data dan informasi tentunya akan memberikan kemudahan dalam pengambilan keputusan secara cepat dan tepat sasaran, untuk memberikan kemudahan bagi pengelola dan pelaksana SSIM-PKBN baik di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/ Kota maupun pengguna data dan informasi lainnya, maka dalam proses pengembangannya tidak terlepas dari peningkatan kemampuan sumber daya manusia, perangkat teknologi dan fasilitas-fasilitas lain yang dapat mendukung terselenggaranya SSIM-PKBN.

3.5.2 Maksud dan Tujuan Sub Sistem Informasi Manajemen Program Keluarga Berencana (SSIMPKBN) Bagian dari website ***www.bkkbn.go.id*** di BKKBN Provinsi Jawa Barat

Tujuan pelaksanaan pengolahan data dan pengembangan teknologi informasi dalam pelaksanaan Program KB Nasional bertujuan untuk mewujudkan terlaksananya pengolahan dan pengembangan teknologi informasi pada berbagai

tingkatan wilayah program guna kelancaran dan peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam peyediaan data dan informasi secara cepat, tepat, lengkap dan akurat bagi para pengelola dan pelaksana program KB Nasional. Berikut ini tujuan yang ingin di capai melaui SSIM-PKB di antaranya sebagai berikut:

a. Tersedianya data dan informasi melalui penyediaan program aplikasi standard dan mekanisme pengolahan dengan mendayagunakan teknologi informasi pada berbagai tingkatan wilayah program.
b. Terselenggaranya desentralisasi pengolahan data di seluruh kabupaten/ kota dengan penggunaan aplikasi standar sesuai kebutuhan program secara bertahap yang disesuai kemampuan dan potensi sumber daya yang ada pada masing-masing kabupaten/ kota.
c. Terselenggaranya komunikasi data baik dalam area luas secara eksternal maupun internal melalui jaringan komputer untuk mendukung terwujudnya pelayanan data dan informasi di berbagai tingkatan dan antar wilayah.
d. Terwujudnya database terpadu sebagai bank data Program Keluarga Berencana Nasional dan Pembangunan Keluarga Sejahtera di berbagai tingkatan.
e. Terwujudnya penyediaan, peningkatan, pemeliharaan dan pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi (perangkat komputer dan kelengkapannya) secara efisien dan efektif.
f. Menyiapkan dukungan teknis untuk menjamin tersedianya Sumber Daya Manusia yang profesional, berkualitas, handal dan mandiri untuk

melaksanakan pengolahan data dengan pendayagunaan teknologi informasi pada berbagai tingkatan wilayah program.

3.5.3 Tampilan Sub Sistem Informasi Manajemen Program Keluarga Berencana SSIMPKBN Bagian dari website ***www.bkkbn.go.id*** di BKKBN Provinsi Jawa Barat

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dalam memberikan informasi mengenai Keluarga Berencana kepada Masyarakat yang memerlukan Informasi tentang Keluarga Berencana yang ada di Jawa Barat melalui Sub Sistem Informasi Manajemen Program Keluarga Berencana SSIM-PKBN dimana terdapat semua Informasi tentang KB agar lebih mempermudah memberikan Informasi kepada Masyarakat dan lebih mudah tinggal mengakses *website www.bkkbn.go.id* Masyarakat dengan mudah untuk mencari info tentang KB yang di butuhkan. Dengan cara sebagai berikut:

a. Gunakan browser mozila firefox atau internet explorer
b. Ketik *www.bkkbn.go.id* untuk menggunakan *wesite* BKKBN

   Setelah diperoleh *bandwidth* yang memadai akses web publik BKKBN dapat diakses melalui *www.bkkbn.go.id*, tampilan layar akan menjadi sebagai berikut :

Gambar 3.3
Tampilan SSIM-PKBN Bagian dari *website www.bkkbn .go.id*



Sumber.*www.bkkbn.go.id*

Pada gambar 3.3 adalah halaman depan dimana semua Informasi tentang KB dapat di lihat oleh publik dan bagi pejabat BKKBN khususnya pegawai yang ada di Bidang informasi Keluarga dan Analisis Program (IKAP) bisa *Log in* dengan memasukan *user name* dan *pasworrd* bagi pejabat yang ingin memasukan data informasi yang di peroleh dari Kabupaten/kota dan kecamatan juga dapat di lakukan disini.

Berdasarkan gambar di atas dapat di lihat di gambar tersebut ada profil, Berita, Rubrik, Info Program, Galeri, UPPKS, dan LINK dari masing-masing menu tersebut memiliki fungsi yang berbeda dan mempunyai berita/informasi yang berbeda yakni seperti di bawah ini:

Profil : Informasi keberadaan program KB di setiap daerah
Berita : Seluruh aktifitas kegiatan yang dilakukan di setiap daerah.
Rubrik : Artikel tentang dinamika perkembangan program KB

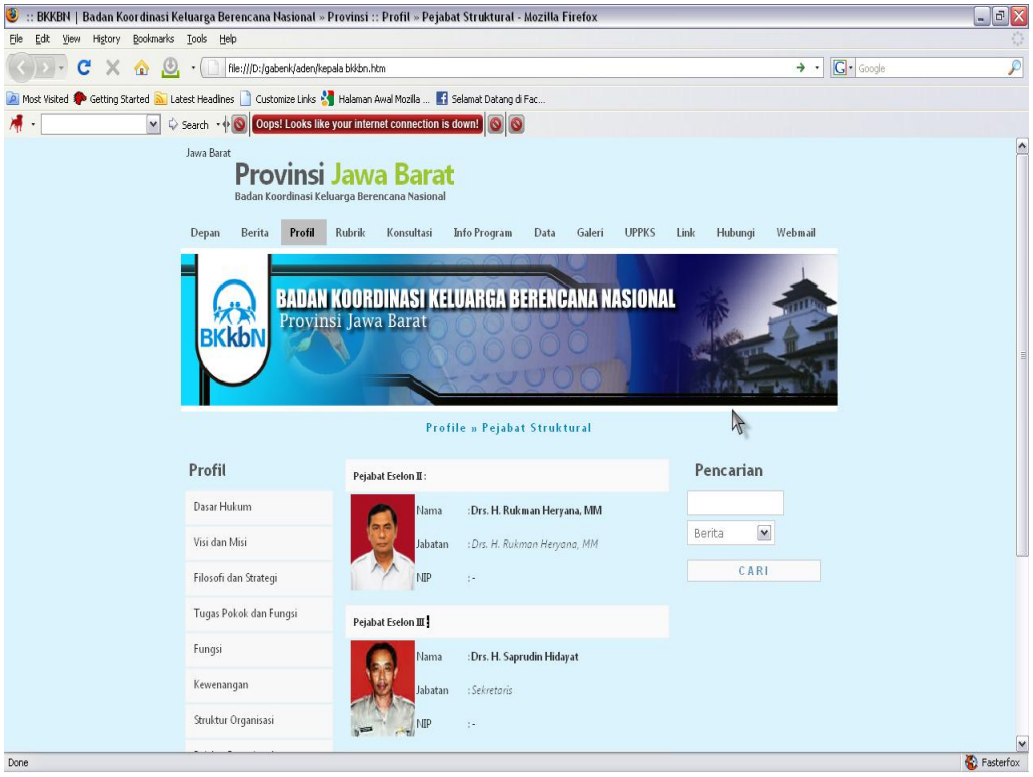
Info Program : Informasi yang dapat dimanfaatkan khususnya para petugas dan pengelola program KB

Galery : Foto-foto pelaksanaan kegiatan program KB

UPPKS : Media pemasaran hasil produk kelompok UPPKS

LINK : Fasilitas dihubungkan website organisasi lainnya.

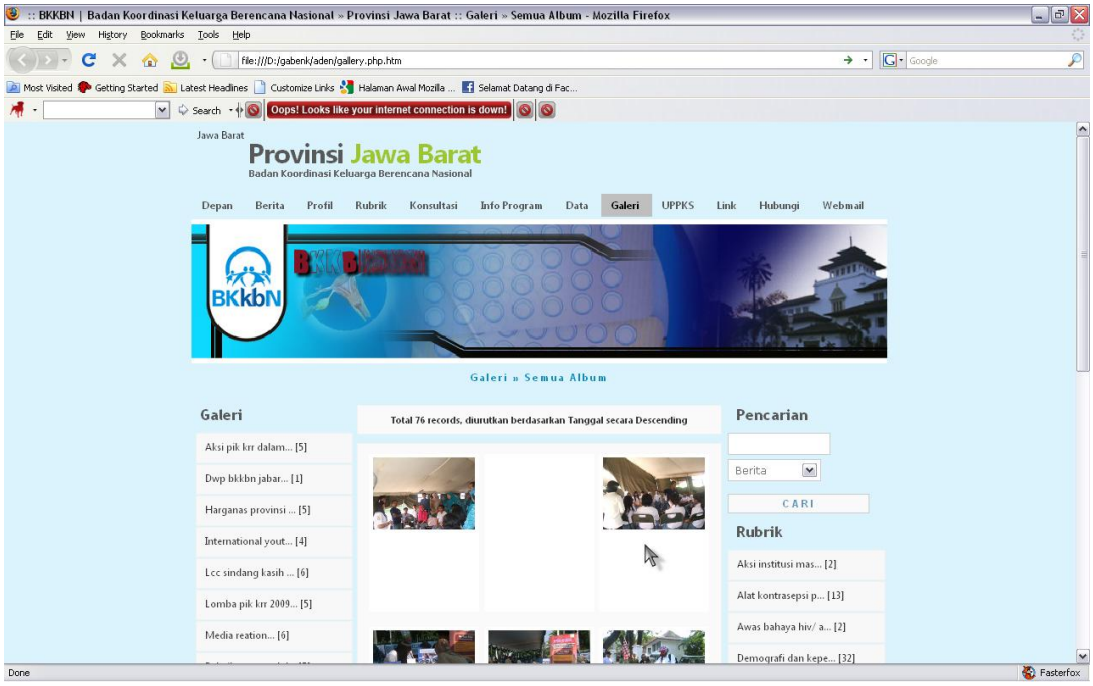
Gambar 3.4
Tampilan Profil SSIM-PKBN Bagian dari
website www.bkkbn .go.id



Sumber.*www.bkkbn.go.id*

Gambar 3.4 menunjukan tentang Profil yang ada dalam SSIM-PKBN disini kita dapat mengetahui tentang Profil dari BKKBN khususnya BKKBN Provinsi Jawa Barat dalam mempermudah masyarakat yang ingin mengetahui tentang BKKBN maka tidak perlu datang ke kantor BKKBN sekarang bisa dengan mudah mengaksesnya *www.bkkbn.go.id* lewat internet

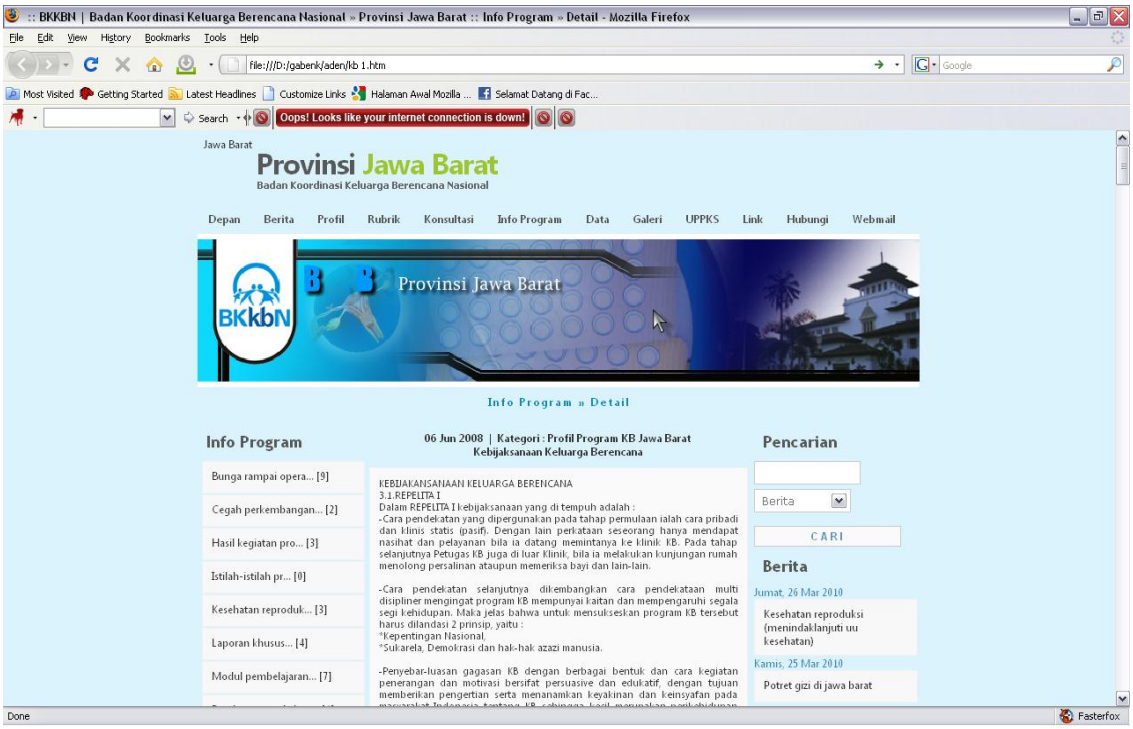
Gambar 3.5
Tampilan Galery SSIM-PKBN Bagian dari *website www.bkkbn .go.id*



Sumber.*www.bkkbn.go.id*

Gambar 3.5 yakni mengenai Galery yang ada dalam SSIM-PKBN disini kita bisa melihat apa saja yang di dokumentasikan kegiatan yang di lakukan di lapangan maupun di BKKBN itu sendiri yang dimasukan ke *website www.bkkbn.go.id*.

Gambar 3.6
Tampilan Info program Bagian dari *website www.bkkbn .go.id*



Sumber.*www.bkkbn.go.id*

Gambar 3.6 mengenai tentang Info Program bila masyarakat mengakses Info program maka akan terlihat semua program yang akan di lakukan atau pun yang sudah di lakukan yakni berupa laporan/hasil dari program tersebut. Bagi masyarakat yang ingi mengetahui informasi KB maka dengan mudah bisa di akses lewat website *www.bkkbn.go.id* .